



The Challenges in Village Fund Management in Enhancing Infrastructure Development and Community Empowerment in Nagari Muara Inderapura, Pesisir Selatan Regency

Sari Zaman Wulandari¹, Hasbullah Malau²

sarizamanwulandari@gmail.com@hasbullahmalau@fis.unp.ac.id

¹ Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Negara Indonesia

² Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Negara

ABSTRAK

This study aims to identify and analyze the challenges in optimizing village fund management in Nagari Muara Inderapura, Pesisir Selatan Regency. Village fund management plays a crucial role in supporting infrastructure development and community empowerment at the nagari level. However, its implementation still faces various challenges that hinder effective and targeted fund management. This research employs a descriptive qualitative method with a field study approach through interviews, observation, and documentation. The findings reveal several key challenges, including the lack of human resource skills, changes in village fund regulations, limited annual budget allocations, and insufficient workforce at the nagari level. On the other hand, infrastructure development has shown positive impacts on the community. These findings highlight the need to improve the capacity of nagari officials, ensure policy flexibility in fund allocation, and strengthen community participation in planning and implementation processes. The implications of this study emphasize that achieving optimal village fund management requires synergy between the nagari government, local communities, and higher-level authorities to ensure effective and sustainable village development.

Keywords: Community empowerment, infrastructure, challenges, village fund.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Untuk memperkuat sistem demokrasi ini, pemerintah menerapkan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada daerah, termasuk desa, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Salah satu implementasi nyata dari kebijakan ini adalah pengakuan terhadap desa sebagai unit pemerintahan terkecil yang diberikan kewenangan dalam mengelola sumber daya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagai komitmen dalam pemerataan pembangunan serta upaya pengentasan kemiskinan di wilayah perdesaan.

Dalam konteks pembangunan desa, Dana Desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui dua fokus utama, yaitu pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Infrastruktur merupakan salah satu pilar utama pembangunan. Seperti yang dikemukakan oleh Siagian (2007), pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana untuk mendorong perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Infrastruktur yang memadai berkontribusi terhadap produktivitas masyarakat serta mempercepat konektivitas sosial dan ekonomi (Grigg, 1998; Kodoatie, 2003). Sementara itu, pemberdayaan masyarakat menjadi pendekatan penting untuk mendorong kemandirian. Prijono dan Pranarka (1996) menekankan bahwa pemberdayaan merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat agar mampu menentukan arah hidupnya sendiri secara mandiri dan berkeadilan.

Meskipun Dana Desa telah diupayakan secara optimal dalam berbagai program, pelaksanaan di lapangan tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Di Nagari Muara Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, yang setiap tahun menerima alokasi Dana Desa, masih dijumpai berbagai tantangan dalam pengelolaannya. Nagari ini terdiri atas dua kampung, yakni Kampung Air Mati dan Kampung Bukit Bujang-Bujang, dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan buruh tani. Tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan kompetensi aparat desa dalam perencanaan dan pengelolaan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan, serta minimnya evaluasi terhadap keberhasilan program yang telah dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya optimalisasi pengelolaan Dana Desa masih membutuhkan perbaikan dan strategi yang berkelanjutan.

Berbagai program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dari dilaksanakan di Nagari Muara Inderapura seperti yang dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Muara Inderapura

No	Bidang dan Program	
	Pembangunan Infrastruktur	Pemberdayaan masyarakat
1	Irigasi Sawah	Pemberdayaan perempuan
2	Perbaikan atau penimbunan jalan	Pemberdayaan dalam peternakan
3	Pembangunan MCK	Pemberdayaan pelatihan dan perlindungan anak
4	Pembangunan RTLH	Pemberdayaan dalam pertanian
5	Pembangunan MDA	Pemberdayaan peningkatan kapasitas desa

Berbagai program pembangunan dan pemberdayaan yang tercantum dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa Dana Desa di Nagari Muara Inderapura telah dimanfaatkan untuk sektor-sektor yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan pembangunan infrastruktur meliputi pembangunan sarana dasar seperti irigasi, jalan, MCK, rumah tidak layak huni (RTLH), dan sarana keagamaan. Di sisi lain, program pemberdayaan masyarakat diarahkan pada peningkatan kapasitas perempuan, pengembangan sektor peternakan dan pertanian, perlindungan anak, serta penguatan kapasitas pemerintah nagari.

Berbagai penelitian terdahulu turut memperkuat temuan ini. Jhon Chaidir (2022) dalam penelitiannya di Desa Teluk Terate, Kabupaten Serang, menunjukkan bahwa implementasi Dana Desa terkendala oleh ego sektoral antarinstansi dan rendahnya kompetensi pendamping

desa, yang berujung pada rendahnya efektivitas pembangunan. Penelitian oleh Risya Novita Sari, dkk. (2015) juga menemukan bahwa lemahnya koordinasi dan tidak optimalnya alokasi anggaran menjadi penghambat utama dalam pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, Bernardus Seran, dkk. (2017) menyoroti bahwa Dana Desa yang ditujukan untuk mendukung sektor pertanian masih belum dikelola secara tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga studi ini menunjukkan bahwa tantangan dalam pengelolaan Dana Desa merupakan isu yang berulang dan belum sepenuhnya terpecahkan.

Jika ditelaah secara lebih dalam, tantangan-tantangan tersebut mencerminkan adanya hambatan baik dari sisi internal maupun eksternal desa. Secara teoritis, tantangan dapat dimaknai sebagai rintangan yang mendorong seseorang atau kelompok untuk meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan persoalan (Rollings & Ernest, 2003). Winarso (2021) juga mengartikan tantangan sebagai bentuk usaha yang menggugah kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, tantangan ini berkaitan erat dengan kapasitas sumber daya manusia, fleksibilitas dalam menghadapi perubahan regulasi, serta kemampuan desa dalam menyusun program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Mulyadi Yadi (2018), dua tantangan utama dalam pengelolaan Dana Desa adalah rendahnya keterampilan aparat desa dan seringnya terjadi perubahan regulasi, yang mengganggu stabilitas perencanaan dan implementasi program.

Namun demikian, studi-studi sebelumnya sebagian besar lebih menitikberatkan pada hasil dan pelaksanaan program Dana Desa tanpa mengupas secara mendalam konteks dan tantangan yang dihadapi dalam proses pengelolaannya. Di sinilah letak kesenjangan penelitian (research gap) yang coba diisi oleh studi ini. Terutama pada wilayah dengan kondisi sosial ekonomi spesifik seperti Nagari Muara Inderapura, belum banyak ditemukan penelitian yang secara khusus membedah tantangan-tantangan dalam optimalisasi pengelolaan Dana Desa yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa di Nagari Muara Inderapura, khususnya dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat secara lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pendekatan analisis terhadap faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa di tingkat lokal, serta menekankan pentingnya perbaikan kapasitas institusional dan adaptasi terhadap kebijakan sebagai kunci keberhasilan pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif, dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam mengungkap fenomena sosial secara mendalam. Penelitian dilakukan secara langsung di lapangan dengan memanfaatkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Bendahara Nagari, Kepala Kampung, serta masyarakat yang terlibat atau menerima dampak langsung dari pengelolaan dana desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi.

Alat analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola dan hubungan antar kategori yang relevan dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Muara Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan dana desa memegang peran strategis sebagai sumber pembiayaan utama di tingkat nagari. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana desa tidak selalu berjalan mulus dan optimal. Terdapat berbagai faktor yang menjadi penghambat atau tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan pengelolaan yang efektif, transparan, dan tepat sasaran. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi pengelolaan dana desa di Nagari Muara Inderapura sebagai berikut :

Masih kurangnya keterampilan Sumber Daya Manusia

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan dana desa di Nagari Muara Inderapura adalah masih kurangnya keterampilan sumber daya manusia (SDM), baik dari pihak aparat nagari maupun masyarakat penerima manfaat. Menurut Mulyadi Yadi (2018), keterampilan yang rendah pada aparat desa berdampak pada lemahnya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dana desa. Kondisi ini menyebabkan program-program yang dirancang tidak berbasis pada kebutuhan dan kapasitas masyarakat, sehingga sulit untuk mencapai tujuan pemberdayaan dan pembangunan secara optimal.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa kurangnya keterampilan SDM memengaruhi efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan, khususnya dalam sektor peternakan. Program yang seharusnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat justru tidak membuahkan hasil maksimal karena berbagai kendala teknis. Aparat nagari belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menentukan jenis ternak yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan potensi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat penerima bantuan ternak juga menunjukkan minimnya kemampuan dalam memelihara serta mengelola ternak dengan baik, bahkan sebagian tidak memiliki motivasi untuk terlibat secara aktif dalam program tersebut.

Akibat dari rendahnya keterampilan ini, program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru tidak memberikan dampak signifikan. Bantuan ternak yang diberikan tidak berkembang dan bahkan menjadi beban, karena tidak ada pendampingan teknis dan pelatihan yang berkelanjutan. Hal ini mencerminkan bahwa tanpa peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, bimbingan, dan pendampingan yang intensif, pengelolaan dana desa hanya akan menjadi kegiatan formalitas yang jauh dari keberhasilan tujuan pembangunan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM menjadi kunci penting dalam optimalisasi dana desa agar benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Berbeda dengan tantangan pada program pemberdayaan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Nagari Muara Inderapura menunjukkan hasil yang lebih positif. Masyarakat telah merasakan secara langsung manfaat dari infrastruktur yang dibangun melalui dana desa, terutama dalam hal aksesibilitas. Salah satu contohnya adalah kegiatan penimbunan jalan yang berfungsi sebagai akses utama masyarakat menuju lahan pertanian. Jalan yang sebelumnya rusak dan sulit dilalui walaupun masih ada sebagian jalan yang belum diperbaiki, namun sebagian jalan yang diperbaiki juga telah mampu mempermudah aktivitas warga dalam mengangkut hasil pertanian serta menjangkau pusat ekonomi desa. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa ketika perencanaan dan pelaksanaan dilakukan dengan tepat sasaran serta berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, dana desa mampu memberikan dampak yang signifikan dalam mendukung produktivitas dan kesejahteraan

warga.

Perubahan regulasi

Selain keterbatasan keterampilan SDM, tantangan lain dalam pengelolaan dana desa di Nagari Muara Inderapura adalah perubahan regulasi mengenai pengelolaan dan prioritas penggunaan dana desa. Menurut Mulyadi Yadi (2018), perubahan regulasi dapat mempersulit proses perencanaan dan pelaksanaan program karena pemerintah desa harus terus menyesuaikan kebijakan dengan aturan yang terus berkembang. Hal ini menciptakan hambatan teknis dan administratif yang berdampak pada keterlambatan atau pengalihan program yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, pemerintah nagari dan masyarakat telah merencanakan kegiatan perbaikan jalan akses tani di nagari dengan cakupan yang lebih luas sebagai upaya memperbaiki akses masyarakat menuju lahan pertanian dan pusat aktivitas ekonomi. Namun, rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena adanya perubahan regulasi yang menetapkan prioritas dana desa untuk program pemberdayaan tertentu. Akibatnya, pembangunan infrastruktur yang bersifat jangka panjang harus tertunda atau dilakukan secara terbatas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan nasional belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik di tingkat lokal. Keterbatasan ruang gerak dalam penggunaan dana desa membuat pemerintah nagari sulit menjawab harapan masyarakat secara maksimal. Diperlukan adanya kebijakan yang lebih fleksibel agar program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dapat terlaksana tanpa harus terkendala oleh perubahan regulasi yang tidak sesuai dengan konteks daerah.

Terbatasnya dana desa

Tantangan berikutnya dalam pengelolaan dana desa di Nagari Muara Inderapura adalah keterbatasan anggaran yang tersedia setiap tahunnya. Dana desa yang diterima memiliki jumlah terbatas, sementara kebutuhan masyarakat yang terus berkembang menuntut pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi ini menyebabkan pemerintah nagari harus melakukan seleksi dan penyesuaian secara ketat terhadap usulan-usulan program yang diajukan oleh masyarakat. Banyak aspirasi warga yang belum dapat diakomodasi karena keterbatasan dana, sehingga hanya program tertentu yang dianggap paling mendesak yang bisa direalisasikan.

Keterbatasan ini mendorong pemerintah nagari untuk membuat keputusan secara lebih strategis dan efisien. Setiap program yang dipilih harus mempertimbangkan urgensi, dampak luas terhadap masyarakat, serta kemungkinan realisasinya dengan dana yang tersedia. Hal ini sesuai dengan pendapat Hotnair (2005), yang menyatakan bahwa dalam kondisi sumber daya yang terbatas, pengambilan keputusan harus disesuaikan agar tetap memberikan hasil yang optimal. Pemerintah nagari mencoba menyeimbangkan antara banyaknya kebutuhan dengan kemampuan anggaran, tanpa mengorbankan kualitas pelaksanaan program.

Upaya pengoptimalan terus dilakukan meskipun dalam keterbatasan. Pemerintah nagari juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam musyawarah nagari untuk menentukan prioritas pembangunan secara bersama-sama. Dengan pendekatan partisipatif ini, keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang mutlak, melainkan menjadi tantangan yang mendorong munculnya kebijakan yang lebih bijak, adaptif, dan terarah. Keputusan yang diambil bukan semata berdasarkan keinginan pemerintah, tetapi merupakan hasil kesepakatan kolektif yang mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas.

Kurangnya sumber daya manusia

Tantangan lainnya dalam pengelolaan dana desa di Nagari Muara Inderapura adalah

terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di tingkat nagari. Kekurangan tenaga kerja menyebabkan pelaksanaan sejumlah kegiatan mengalami keterlambatan bahkan penundaan. Beberapa program yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal karena tidak ada cukup personel yang dapat menangani pekerjaan tersebut. Kondisi ini menimbulkan beban kerja yang menumpuk pada perangkat nagari yang ada, sehingga efektivitas pelaksanaan program menjadi terganggu. Pembagian tugas menjadi tidak seimbang, dan potensi kesalahan dalam pelaksanaan meningkat karena pekerjaan yang seharusnya ditangani oleh lebih banyak orang justru dikerjakan oleh pihak yang terbatas..

Situasi ini menegaskan perlunya penambahan dan penguatan struktur tenaga kerja di tingkat nagari, agar seluruh program dapat berjalan sesuai perencanaan. Ketersediaan SDM yang memadai sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program secara tepat waktu dan efisien. Tanpa dukungan jumlah personel yang cukup, pengelolaan dana desa akan terus menghadapi hambatan teknis yang mengganggu pencapaian tujuan pembangunan di tingkat lokal.

KESIMPULAN

Pengelolaan dana desa di Nagari Muara Inderapura memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Namun, optimalisasi pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kurangnya keterampilan sumber daya manusia, perubahan regulasi prioritas dana, keterbatasan anggaran tahunan, serta kekurangan jumlah tenaga kerja di tingkat nagari. Meskipun demikian, beberapa capaian positif seperti pembangunan infrastruktur yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang tepat, dana desa tetap mampu memberikan dampak positif. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut agar pengelolaan dana desa semakin efektif dan berdaya guna.

Untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan dana desa ke depan, pemerintah nagari perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat dalam menyikapi perubahan regulasi agar tetap sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, penting untuk menambah jumlah tenaga kerja di tingkat nagari dan memperkuat sistem kerja agar pelaksanaan program berjalan tepat waktu. Pemerintah nagari juga disarankan terus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan melalui musyawarah nagari, guna memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar berdasarkan kebutuhan bersama dan memberikan manfaat yang merata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ariesta Setywati, dkk. 2024. Media Pembelajaran Berbasis Digital. Jawa Barat : PT Arr Rad Pratama.

Anggreni, Dhonna. 2022. Metode Penelitian Kesehatan. Mojokerto : Stikes Majapahit Mojokerto.

Fientika, dkk. 2022. Metode Penelitian Kualitatif. Padang : PT. Global Eksekutif Teknologi.

Hamidi Lazim, Lutfi Mustafa. 2010. Civid Education Antara Realitas Politik dan



- Implementasi Hukum. Jakarta : PT Gramedia Building.
- Kewo, Lelly, Cicilia.2024. Manajemen Kinerja Akuntansi Sektor Publik, Teori dan Aplikasi. Pasaman Barat : Cv. Azka Pustaka.
- Lexi, Moleng. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rienka Cipta.
- Martini Rita, dkk. 2024. Buku Ajar Audit Manajemen. Jambi : PT Sonpedia Publihing Indonesia.
- Negara Jaya Agus Gede, dkk. 2021. Transformasi Media Pembelajaran Sebagai Upaya Optimalisasi Perkuliahan. Bali : Yayasan Martajati Widya Mandala.
- Palilu, Alam. 2022. Pembangunan Infrastruktur Transportasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Pasaman Barat : Cv. Azka Pustaka.
- Rauf, Rahyunir dan Maulidia, Sri. 2015. Pemerintahan Desa. Pekanbaru : Zanafa Publishing.
- Rosmayati Siti, dkk. 2021. Pengelolaan Pembelajaran dalam Proses Pengembangan Sosial Emosional Standar Paud. Guepedia.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- Suhermiko dan Sihaloha. 2022. Optimalisasi fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Surabaya : Scopindo Media Pustaka.
- Wahyuni, Sri dan Sriyanto, Dermawan. 2022. Pengelolaan Dana Desa demi Kesejahteraan Masyarakat. Padang Sidempuan : PT Inovasi Pratama Internasional.
- Yusran Ali, dkk. 2021. Dana Desa dan Pembangunan Dalam Perspektif Administrasi Publik. Sulawesi Selatan. CV. Berkah Utami.
- Yuesti, Anik. 2023. Akuntansi Dana Desa. Zifatama Jawara.

Jurnal dan UUD

- Agusman dan Abdul Miirad. 2021. Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Jurnnal JAPS. 2(2). 90-98.
- Alfiana dan Ilmi Usroth Choriyah. 2022. Pemberdayaan Masyarakat dalam program Puspaga dikelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Surabaya. Jurnal Publicuho. 7(3). 1272-1287.
- Chaidir, Jhon. 2022. Management of Village Funds for Development in Serang District (Case Study in Teluk Terate Village). Jurnal PINISI. 5(2). 417-426.
- Darmi Titi dan Iqbal Mistakhul. 2020. Peningkatan Kapasitas Kebijakan dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan. Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies. 3(1). 547-566.

Sala, Y. & Mahdalena. 2023. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas (Studi Kasus di Desa Batubulowe Kec. Dungaliyo Kab. Gorontalo). *Jurnal Of Management & Business*. 6(1). 902-909.

Susilonigtyas Lulu, dkk. 2024. Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesehatan di Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. *Jurnal Ilmiah Pemenang*. 6(1). 65-76.

Sari Novita Risya, dkk. 2015. Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik*. 3(11). 1880-1885.

Triyono. 2022. Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Variabel Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 9(1). 104-111.

Yulianta Ade Lutfi, dkk. 2020. Optimalisasi Dana Desa Melalui Analisis Pembelanjaan di Desa Pabelan Kabupaten Semarang. *Jurnal Abdi Insani Universitas Mataram*. 7(1). 19-26.

Zakir, Fauzan. 2021. Mengenai Sistem Pemerintahan Nagari di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ensiklopedia*. 3(5). 53-57.

Riski Intan Kumala. 2022. Analisis Pengelolaan Dana Desa. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UU Permendesa Nomor 7 Tahun 2023.

UU Nomor 6 Tahun 2014.

UU Nomor 9 Tahun 2015.